



Buletin Parlementaria



3 Serangan PDNS Harus Ditindak Tegas



4 Rekomendasikan Perbaikan Total Penyelenggaraan Haji



Desak BSSN Lindungi Data dari Ancaman Siber



Angkat Potensi Lokal ke Nasional dan Internasional



Sidak Lapas & Program Pembinaannya

Nomor 1302/IV/VII/2024 Juli 2024



9 772614 339005



Sidak Lapas & Program Pembinaannya



FOTO: UBADI/ANDRI

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas.

"Kalapasnya, Pak Teguh, ini memperlihatkan beberapa hal-hal yang memang layak menjadi contoh juga. Karena ada beberapa aktivitas para binaan ini yang bisa menghasilkan. Salah satunya menjahit, bisa dibina di situ," ujar Supriansa disela-sela Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lapas

Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7).

Program pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan

para warga binaan agar bisa mandiri setelah bebas nanti, sehingga mereka dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka masuk ke Lapas. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap suasana kekeluargaan di dalam Lapas.

Fasilitas untuk pengunjung juga menjadi perhatian Komisi III. Dimana anggota dewan menyaksikan para pengunjung datang dengan tertib. "Mereka diberikan tempat yang baik, mereka bisa bercengkrama, mereka bisa berdialog dengan keluarganya. Dan itu kelihatan sangat sehat sekali," kata Supriansa.

Namun, Supriansa dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyoroti anggaran untuk makan warga binaan yang dinilai terlalu kecil, hanya Rp20.000 untuk tiga kali makan. Dalam kesempatan itu, Adies sebagai pimpinan tim kunjungan menyatakan akan mengevaluasinya. Tentu hal ini akan menjadi perhatian di Komisi III supaya bisa ditingkatkan anggaran makan tersebut. — uf/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Serangan PDNS Harus Ditindak Tegas



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani usai rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada tindak lanjut yang serius dalam kasus serangan ransomware Brain Cipher pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

“Di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini,” ucap Puan di Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Seperti diketahui pada pekan lalu PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, mengalami serangan *ransomware* yang cukup serius yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Berdasarkan hasil analisis forensik sementara ditemukan bahwa serangan ini melibatkan varian baru ransomware bernama Brain Cipher, yang merupakan pengembangan dari Lockbit 3. Para peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar, namun pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar tebusan tersebut.

Oleh karenanya, Puan meminta ada tindak lanjut dari kejadian yang merugikan masyarakat tersebut. “Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri,” terangnya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapannya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wlga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balgeys Maeshyntha, Anju Alfonso Stimpot, Zutfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno P.D. Moempoeni, Azka Restu Alfdhilla, Gerald Opie,
Hasri Mentaen, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P.,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Rekomendasikan Perbaiki Total Penyelenggaraan Haji



FOTO: SKR/PDT

Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar saat melakukan pengawasan haji 2024 di Makkah, Arab Saudi, Kamis (20/6/2024).

Penyelenggaraan Haji tahun 2024 menjadi sorotan sejumlah pihak, tak terkecuali dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Dari hasil pengawasan Timwas Haji DPR RI saat meninjau penyelenggaraan haji di Arab Saudi beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah masalah yang sangat krusial.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar menggagas revolusi penyelenggaraan haji, menurutnya harus ada perbaikan total. "Kebutuhan jemaah perlu diper-siapkan sejak awal, tidak ada ketergesaan, tidak dadakan. Jadi, kesimpulannya harus ada

revolusi penyelenggaraan haji, diniatkan dari awal, perbaikan total," ujar Gus Imin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/7).

Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin, lantas mengurai 5 masalah krusial penyelenggaraan haji 2024. Yaitu layanan dasar yang buruk, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai dengan maktab, penyediaan MCK yang memprihatinkan, hingga kenaikan ongkos haji.

Menurut Gus Muhaimin, tenda di Maktab Mina melebihi kapasitas dan menyebabkan jemaah terlantar. Hal ini terjadi karena

penempatan tenda tak sesuai dengan maktabnya. Begitu juga masalah toilet untuk Jemaah haji yang sangat minim sekali sehingga menyebabkan antrian panjang. Politisi PKB itu menyebut kondisi ini memaksa jemaah berhajat di luar toilet.

Selain itu, lanjut Gus Muhaimin, Timwas DPR juga menemukan fakta alokasi separuh kuota tambahan untuk haji khusus yang diduga menyalahi aturan. "Ada kurang lebih 10 ribu dari 20 ribu kuota tambahan yang dialihkan Kementerian Agama untuk haji khusus. Ini tentu mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah bertahun-tahun mengantri haji," ungkapnya. **— sb/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Desak BSSN Lindungi Data dari Ancaman Siber

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Hal itu ia sampaikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis, (4/7).

“Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif,” jelas Utut kepada **Parlementaria**.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia. Karena itu, Utut pun berharap



FOTO: HNM/RDN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis, (4/07/2024).

agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi

SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.

“Jadi, di sini kita (Komisi I DPR RI) juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat perlindungan, dan, berdasarkan pendekatan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga menjelaskan bahwa BSSN harus diberdayakan sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang siber. “Kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu menahan serangan-serangan ke pemerintah,” jelas Sturman.

hnm/rdn

UNTUK ITU, BSSN INI PERLU MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN DAN KOMPETENSI SDM YANG BERKUALITAS DAN RESPONSIF TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KEAMANAN SIBER YANG KUAT, HINGGA REGULASI YANG IMPLEMENTATIF

Utut Adiyanto

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Angkat Potensi Lokal ke Nasional dan Internasional



FOTO: GYS/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari saat memimpin kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke TVRI Serang, Banten, Kamis (04/07/2024).

Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka meninjau pembangunan gedung baru TVRI Stasiun Banten yang telah rampung dan siap beroperasi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari bersama tim meninjau langsung proses produksi di stasiun TVRI yang berlokasi di Kota Serang, Banten, tersebut.

Dengan rampungnya pembangunan gedung baru ini, Komisi I berharap TVRI Banten dapat menjadi media yang lebih efektif dalam mengangkat dan mempromosikan potensi-potensi daerah Banten. Stasiun TVRI juga diharapkan bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang Banten, yang tidak hanya kepada masyarakat lokal tetapi juga kepada masyarakat nasional dan global.

“Saya kira ini sudah saatnya bisa memulai perjalanan stasiun TVRI.

“

KOMISI I BERHARAP TVRI BANTEN DAPAT MENJADI MEDIA YANG LEBIH EFEKTIF DALAM MENANGKAT DAN MEMPROMOSIKAN POTENSI-POTENSI DAERAH BANTEN.

Abdul Kharis Al Masyhari

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Tentunya kita harap ke depan makin dilengkapi dan makin beroperasi dengan baik. Harapannya adalah bahwa apa yang ada di Banten bisa disampaikan kepada masyarakat Banten secara keseluruhan dan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia. Itu harapan kita,” ujar Abdul Kharis di Serang, Banten, Kamis (4/7).

“Komisi I DPR RI mendukung upaya kualitas TVRI Banten. Kami hadir di sini untuk melihat secara langsung bagaimana TVRI Banten beroperasi dan ke depannya kita akan terus mendukung bagaimana memajukan TVRI Banten melalui LPP TVRI,” tambah Ketua Komisi I.

Dengan dukungan penuh dari Komisi I, diharapkan TVRI Banten dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Banten dan Indonesia secara keseluruhan. **gys/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Masukan Penting ke Pilkada Surakarta

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta mengatakan bahwa kesiapan pilkada di Surakarta sudah maksimal. Mulai dari anggaran hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, persiapan TPS, dan tahapan pelaksanaannya.

“Tentunya saya yang mengampu dabil ini akan selalu mengawasi dan memberikan saran dan masukan sebagaimana saya lakukan ketika Pemilu Legislatif kemarin,” katanya saat di Balai

Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (8/7).

Masukannya adalah, ia melanjutkan, jangan sekali-kali menyelewengkan atau menyalah-gunakan kewenangan sebagai KPU dan Bawaslu, “Bekerja dengan normatif, jangan tergiur dengan iming-iming dan jangan takut diintervensi oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) kemarin menjadi evaluasi ke depan agar Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti tentunya dapat berjalan dengan

lancar dan tingginya partisipasi masyarakat.

“Dengan pengalaman mereka di Pileg saya pikir mereka bisa melakukannya di Pilkada tahun ini, karena Pilkada ini lebih ringan. Kalau Pileg itu lima surat suara kalau Pilkada ini cuma satu surat saja, saya pikir lebih gampang untuk melaksanakan tugas itu,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kehadiran Komisi II DPR ke Solo tentu memberikan masukan yang baik agar Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar. ➡ **cas/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta di Kantor Bupati Surakarta, Jawa Tengah, Senin (8/7/2024).

FOTO : CAS/PDT

Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada Serentak

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan etik berupa sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspard Gaus menilai pemberhentian ini tidak akan mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 27 November 2024 nantinya.

"Pemberhentian Ketua KPU dari jabatannya dan keanggotaannya itu tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 27 November. Karena tahapan-tahapan Pilkada itu sudah kita sepakati antara DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP," katanya saat ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).



FOTO: ENJO/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Guspard Gaus saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, komisioner KPU bersifat kolektif-kolegial, kewajiban

pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab tidak ditimpakan pada satu orang atau kepada Ketua. Terlebih, menurutnya tanggung jawab Pilkada lebih dititik beratkan pada KPU di daerah.

"Pelaksanaan Pilkada itu tanggung jawabnya adanya di KPU daerah masing-masing. Jadi saya yakin dan percaya bahwa dengan diberhentikannya Hasyim Asyari, Insyaallah kerja-kerja dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar 27 November itu mudah-mudahan tidak terganggu," terang Politisi Fraksi PAN ini.

Oleh karenanya, Guspard menghimbau kepada Komisioner KPU pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar dapat bangkit dan tidak terpuruk dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DKPP. **we/aha**



PEMBERHENTIAN KETUA KPU DARI JABATANNYA DAN KEANGGOTAANNYA ITU TIDAK AKAN BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA YANG AKAN DILAKUKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER.

Guspardi Gaus

Anggota Komisi II DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Masifnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan di Provinsi DIY, Bantul pada Senin (1/7/2024).

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian. Hal itu ia pandang mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu ketahanan lahan pertanian yang berakibat pada suplai pangan nasional.

"Hal ini membuat kita di Komisi IV DPR RI menjadi gelisah. Tanah-tanah produktif yang merupakan lahan kelas satu itu beralih fungsi untuk kepentingan diluar pertanian (non pertanian). Kita ingin bagaimana caranya untuk memproteksi dan mengembalikan lahan-lahan produktif ini supaya

tidak terus-menerus tergerus untuk kepentingan diluar pertanian," ucap Made saat melakukan kunjungan kerja di Bantul, D.I.Yogyakarta, Senin (1/7)

Menurutnya, bila hal ini terus terjadi maka akan mengganggu ketahanan lahan pertanian-pertanian yang ada. Hal tersebut pula akan mempengaruhi produksi pangan secara nasional. Adapun hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi IV DPR adalah tentang kondisi perberasan saat ini, baik di daerah maupun secara nasional.

"Kita melihat produksi kita terus mengalami penurunan, baik padi, jagung, dan kedelai. Demikian

juga produk-produk pertanian yang lain. Bila tidak kita perbaiki tentang tata kelola perberasan kita ini secara nasional maka secara terus-menerus pula kita akan tergantung kepada beras impor," tandasnya.

Made menambahkan, sekarang ini kita mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. Untuk itu ia mendorong agar pola kemitraan dengan Perum Bulog dapat diperbaiki. "Jangan semuanya dari impor. Kalau terus menerus begitu, kita sama saja memberi kesejahteraan kepada petani asing. Ini harus perbaiki," tegas Made. **dep/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Budi Daya Udang Kebumen Jadi Percontohan

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke tempat budidaya udang yang dikelola oleh Badan Layanan Umum KKP di Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (2/7). Ketua Tim Kunspek sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, menyatakan bahwa pengelolaan tempat budi daya udang di Kebumen tersebut menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dan sangat baik.

"Kita mengunjungi tempat budi daya udang yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Layanan Umum

KKP ini memang sudah cukup baik, kelihatan pengelolannya betul-betul profesional. Kita harapkan dari percontohan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum KKP ini nanti bisa bertambah," ujar Budhy.

Di sisi lain Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti kondisi budidaya udang tradisional di sepanjang garis pantai Selatan Jawa yang masih menggunakan metode tradisional. "Budidaya udang dengan cara tradisional ini rentan terhadap masalah kebersihan air dan penyakit,

sehingga produknya cenderung memiliki kualitas yang rendah," tambahnya.

Legislator Dapil Jabar III ini menegaskan pentingnya pengembangan pola budi daya yang lebih modern untuk meningkatkan produksi dan mengurangi kemiskinan di kawasan pesisir. "Kawasan pesisir dan pantai seringkali menjadi daerah dengan garis kemiskinan yang tinggi. Dengan mengadopsi pola budi daya seperti yang dilakukan oleh KKP, diharapkan para petani tambak udang dapat meningkatkan produksi dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka," paparnya. — pdt/rdn



FOTO: PRIMA

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke tempat budidaya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (2/7/2024).

Peran Strategis Pelabuhan Utama Timur Indonesia



FOTO: WE/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Tim Komisi V DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar New Port di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024).

Tim Komisi V DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik ke *Makassar New Port*, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kunjungan tersebut untuk membahas dan meninjau secara langsung pengelolaan dan penyelenggaraan Makassar New Port ini dalam rangka mendukung angkutan logistik dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa peran Makassar New Port sangat strategis untuk menjadi pelabuhan utama di wilayah Indonesia Timur.

“Kami harapkan pelabuhan ini benar-benar dioptimalkan fungsinya, (untuk) mempercepat waktu *dwelling time*, memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengontrol layanan kapal, terminal, peti kemas, dan logistik secara terpusat,” kata Ridwan di *Makassar New Port*, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Legislator Dapil Sulawesi Tenggara ini mengingatkan, bahwa optimalisasi fungsi Pelabuhan tersebut menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung daya saing logistik nasional. Dengan cakupan

pengawasannya yang tidak hanya terbatas di Makassar, namun juga mencakup wilayah lain di sekitar kawasan ini.

“Selain itu, kami meminta kepada Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak agar nantinya pelabuhan ini dapat terintegrasi dengan kawasan industri berskala besar dan juga terkoneksi dengan moda transportasi lainnya, termasuk kereta api untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini. **we/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyakita Tahun 2024



Puan Maharani
Ketua DPR RI

“Subsidi seharusnya dimaksudkan untuk meringankan beban rakyat. Kalau justru malah jadi memberatkan masyarakat, artinya kebijakan subsidi itu tidak efektif,”



Kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 15.700/liter diputuskan setelah mempertimbangkan nilai Dolar AS yang menguat dan meningkatnya harga bahan pokok lainnya seperti beras



Kenaikan harga Minyakita juga membuat para pelaku umkm terbebani, yang berpengaruh pada pembengkakan ongkos produksi menjadikan omset menurun sedangkan untuk modal membesar



Pedagang pun mengaku sulit mendapatkan pasokan Minyakita dari distributor sehingga menyebabkan kelangkaan karena terjadi kelangkaan produk Minyakita sejak wacana kenaikan harga bergulir beberapa waktu lalu



sebelum ada kenaikan HET, stok Minyakita sudah langka dipasaran bahkan harganya lebih tinggi dari HET yang ditetapkan

Sumber : Dari Berbagai Sumber

Pembangunan Bendungan Jenelata Dimulai

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk meninjau sejauh mana progres pembangunan Bendungan Jenelata. Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunsfik Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan bahwa hingga kini progres pembangunan Bendungan Jenelata sudah mencapai 3,4 persen.

“Pembangunan Jenelata ini sebenarnya sudah kita harapkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa proyek Bendungan Jenelata ini sudah mulai kita laksanakan. Berdasarkan paparan dari kementerian PUPR tadi progresnya sudah mencapai 3,4 persen,” terang Andi Iwan Aras usai melakukan tinjauan lapangan langsung, Jumat (5/7/2024).

Legislator Fraksi Partai Gerindra



itu berharap, proses pembangunan Bendungan yang terletak di Desa Pattaliking dan Mincongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa ini terus berjalan lancar dan

rampung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yakni di tahun 2028.

“Kita berharap bahwa segala bentuk permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tempat ini segera bisa diselesaikan, pembebasan-pembebasan lahannya juga semoga segera bisa diselesaikan, sehingga pekerjaan ini bisa lancar tanpa harus ada kendala klasik seperti pada proyek-proyek lainnya,” ujar Andi Iwan Aras.

Legislator dari Dapil II Sulawesi Selatan itu juga berharap Bendungan Jenelata menjadi bendungan yang berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Sebab, bendungan sebelumnya yakni Bendungan Bili-Bili tidak dapat berfungsi secara optimal dikarenakan terjadinya sedimentasi dari Gunung Bawakaraeng yang bertumpu di bendungan tersebut.

eki/rdn



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama tim saat meninjau progres pembangunan Bendungan Jenelata.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: EKI/PDI

Pertanyakan Skenario Anggaran PLN di IKN



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor UIW PLN Kaltimra, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan bagaimana skenario PLN dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN yang berasal dari Anggaran PLN (APLN) dan bukan melalui APBN. Hal itu karena anggaran yang telah dikucurkan oleh PLN dalam mega proyek ini tahun per tahun memiliki nilai yang cukup fantastis.

"Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah pada seluruhnya skema tersebut dibiayai oleh APLN? Berasal dari pos mana PLN mengambilnya? Lalu bagaimana skema dalam pengembaliannya, maka dari itu kami meminta PLN untuk memberikan *feasibility study*," ujar Rieke saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor UIW PLN Kaltimra,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7).

Karena itu, Rieke mewanti-wanti PLN agar secepatnya dapat memberikan hasil data studi kelayakan kepada Komisi VI walaupun PLN sendiri mengatakan bahwa hasil data tersebut merupakan konsep dari Bappenas dan hanya menjalankan penugasan tersebut. Sehingga, di dalam surat penugasan itu dapat menjadi tameng untuk PLN dalam menghindari beban yang berlebih bagi PLN itu sendiri.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa PLN melalui situsnya menerangkan konsep pembangunan kelistrikan IKN dengan mengusung Energi Baru Terbarukan (EBT). mf/rdn



RIEKE MEWANTI-WANTI PLN AGAR SECEPATNYA DAPAT MEMBERIKAN HASIL DATA STUDI KELAYAKAN KEPADA KOMISI VI WALAUPUN PLN SENDIRI MENGATAKAN BAHWA HASIL DATA TERSEBUT MERUPAKAN KONSEP DARI BAPPENAS DAN HANYA MENJALANKAN PENUGASAN TERSEBUT.

Rieke Diah Pitaloka

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ikut Bangun IKN, SIG Diminta Tetap Jaga Kinerja Bisnis



FOTO: GAL/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7/2024).

PT Semen Indonesia Group (Persero) Tbk atau PT SIG beberapa waktu ini melakukan ekspansi bisnis melalui konsorsium PT Karya Logistik Nusantara (KLN) dengan penyertaan modal sebesar Rp22,5 Miliar. Ekspansi ini dilakukan PT SIG untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam hal pemasokan bahan baku seperti semen dan beton serta pengelolaan logistik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengapresiasi kontribusi yang dilakukan PT SIG. Namun, ia juga meminta pada PT SIG untuk memastikan prosesnya

untuk prudent atau bijak dan hati-hati. Sehingga kinerja perusahaan dapat terus terjaga.

“Kita memberikan apresiasi untuk SIG yang sudah ikut berkontribusi bersama dengan BUMN Karya masuk ke IKN ya dan juga menjadi *frontliner*. Tapi kami juga memberikan masukan agar betul-betul dipastikan prosesnya itu betul-betul *prudent*, agar tidak di kemudian hari berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Jadi itu yang kami selalu ingin jaga,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7).

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi terhadap produk PT

SIG yakni *green cement* (semen hijau) yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan IKN. Semen ini produk ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan karbon yang juga sesuai dengan konsep IKN yang akan menjadi percontohan kota berkelanjutan di Indonesia.

“Satu produk dari SIG yang dalam proses pembuatannya lebih rendah penggunaan karbon sehingga emisi karbonnya juga lebih rendah. Saya rasa ini satu inisiatif yang baik di tengah pasar semen Indonesia yang menurut pantauan kami masih jenuh ya karena *excess supply*,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem itu. **gal/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tingkatkan Keamanan Data Transaksi Digital

Viral di sosial media baru-baru ini, seorang oknum HRD menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Kisah tersebut, menimpa Dewi Rahmawati yang mengetahui hal tersebut setelah membuka aplikasi Wonder by BNI.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyesalkan kejadian tersebut. Ia meminta jajaran Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi Wonder by BNI, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Ini catatan kita. Kita minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa ini saya lihat transaksinya, Pak," kata Darmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Selain Darmadi, Anggota Komisi VI Evita Nursanty juga mengingatkan



Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

baik BNI maupun BTN untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

"Dari aspek digital saya hanya ingatkan saja, Pak. Kita tahu kita kebobolan kemarin ini, tingkatkan

pengamanan security banking Bapak, data Bapak, karena yang tadi disampaikan oleh teman saya itu kan memang terjadi suka enggak suka, kita enggak bisa menutup mata penipuan perbankan ini meningkat Pak," kata Evita. **bia/rdn**



MEMINTA JAJARAN BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) UNTUK MEMPERKUAT PENGAMANAN APLIKASI PERBANKAN MILIK BNI DAN MENDETEKSI APA KELEMAHAN DARI APLIKASI WONDER BY BNI, AGAR KEJADIAN SERUPA TIDAK TERULANG KEMBALI.

Darmadi Durianto

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serahkan Bantuan Sosial di Padang Pariaman

Komisi VIII DPR RI bersama dengan perwakilan Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai Rp45 miliar kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan yang terdiri dari Bantuan PKH, Sembako, ATENSI Pemenuhan Hidup Layak, ATENSI Kewirausahaan dan Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas dan Lansia ini akan disalurkan melalui Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami tentu ingin memastikan berbagai program dari Kementerian

Sosial yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini bisa disalurkan; pertama tepat sasaran, kedua tepat waktu yang ketiga tentu disalurkan dengan beul-betul kepada yang tepat dan berhak penggunaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily di Kota Pariaman, Sumatra Barat, Sabtu (6/7).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pertemuan antara Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman serta BBPPKS Padang. Disampaikan pada pertemuan itu, beberapa kendala

dalam penyaluran bantuan antara lain penerima tidak lagi tinggal di alamat yang terdaftar atau tidak berada di tempat dalam waktu yang lama.

Komisi VIII juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan bidang sosial di wilayah tersebut sehingga tidak semua bantuan berasal dari pemerintah pusat. Selain itu fasilitas penanggulangan bencana pun tak luput menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, mengingat Kabupaten Padang Pariaman masuk dalam daftar wilayah rawan bencana. — uc/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily saat memimpin kunjungan kerja di Kota Pariaman, Sumatra Barat, Sabtu (6/7/2024).

FOTO: UCA/PDT

Mitigasi Bencana di Sumatera Barat Ditingkatkan



FOTO: UL/FPPT

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin Kunjungan Kerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatera Barat.

Intensitas bencana yang sangat tinggi belakangan ini menerpa Sumatera Barat. Untuk itu Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat, dengan fokus utama pada isu kebencanaan.

Hal tersebut menjadi fokus utama saat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatera Barat. "Berdasarkan

laporan yang kami terima, tahun 2023/2024 menunjukkan intensitas bencana yang sangat tinggi, terutama banjir, tanah longsor, dan gempa bumi," ungkapnya Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/7).

Hal ini juga menyampaikan keprihatinannya terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki BNPB untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Oleh karena itu,

ia mengimbau pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam hal penyediaan anggaran.

"BNPB sudah berada di jalan yang benar dan bekerja sesuai dengan perintah konstitusi, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia di manapun berada," ujarnya.

Politisi Fraksi PAN juga menyatakan bahwa Sumatera Barat patut bersyukur telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BNPB. Namun, ia mendorong agar UPTD ini dikembangkan menjadi sebuah balai besar, mengingat kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum.

upi/aha



BNPB SUDAH BERADA DI JALAN YANG BENAR DAN BEKERJA SESUAI DENGAN PERINTAH KONSTITUSI, BAHWA NEGARA BERKEWAJIBAN MELINDUNGI SEGENAP WARGA NEGARA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DI MANAPUN BERADA

Ashabul Kahfi

Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Program PENA Dapat Ditingkatkan Lagi Jumlahnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Menurutnya, nominal yang didapat dari program tersebut agar ditingkatkan untuk menyejahterakan masyarakat kurang mampu.

“Program seperti ini kan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mencoba memberikan modal, ini kesempatan untuk intervensi bagi peningkatan hidup layak bagi mereka,” ujar Marwan ditemui usai penyaluran bantuan sosial di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7).

Dengan semangat dan motivasi itulah, program dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu, Komisi VIII menyepakatinya. Hanya saja, menurut Marwan memang perlu penyempurnaan. Salah satunya peningkatan nominal bantuan, yang ia anggap kisaran 2-4 juta itu



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat menyalurkan bantuan sosial di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).

masih dapat ditingkatkan hingga 10 juta per penerima manfaat untuk hasil yang lebih maksimal.

Untuk mengawasi hal tersebut, Marwan dan tim Komisi VIII akan terus berkeliling di berbagai daerah di Indonesia. “Target kami,

tinjauan ini akan jadi bahan buat kita (DPR) di periode mendatang. Sedalam apa dan apakah sudah tepat sasaran? Info ini terus kami kumpulkan,” terang Politisi Fraksi PKB ini.

Untuk diketahui, Program PENA merupakan upaya meningkatkan produksi atas usaha keluarga kurang mampu di Indonesia. Adapun dalam tinjauan Komisi VIII ke Pariaman kali ini didapati data bahwa pada November 2023 lalu, Kemensos telah menyalurkan bantuan PENA ke masyarakat kota ini senilai Rp68,9 juta.

Dana tersebut merupakan bagian dari jumlah bantuan Rp2,9 miliar yang dialokasikan Kemensos ke Pariaman. Dimana rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III sebesar Rp2,6 miliar, permakanan lansia Rp85,2 juta, Sembako Rp31,3 juta dan yatim piatu atau Yapi Rp113 juta. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Harmonisasi Usulan Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisata

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ichsan Soelistyo menyampaikan bahwa Baleg menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

“Untuk selanjutnya disampaikan kepada pengusul RUU untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan peraturan DPR RI tentang tata cara pembentukan undang-undang,” ujar Ichsan dalam rapat pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Ia melanjutkan, dalam persetujuan yang diamini seluruh fraksi ada



FOTO: DEP/FOI

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ichsan Soelistyo dalam rapat Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

sejumlah catatan yang disampaikan. “Tapi catatannya positif kok,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng sebagai komisi pengusul RUU Kepariwisata mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi yang menyetujui atas perubahan undang-undang tersebut. Ia mengungkapkan bahwa seluruh masukan yang diterima akan diserahkan kepada tenaga ahli untuk dimasukkan dalam draf dan dilakukan perbaikan.

“Untuk itu kami dari pengusul komisi X menyampaikan sekali lagi terima kasih dan hormat kami kepada seluruh pimpinan fraksi yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk disetujuinya perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini,” ujar Agustina Wilujeng dalam Rapat Pleno Baleg itu. [hal/rdn](#)



BALEG MENYETUJUI HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.

Ichsan Soelistyo

Wakil Ketua Baleg DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Defisit 2024 Lebih Target, Usul Gunakan SAL 2023



FOTO: JKA/PDT

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat rapat kerja dengan pemerintah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, belanja negara hingga Semester I-2024 sudah mencapai Rp1.398 triliun, atau 42 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, pendapatan negara masih sangat rendah, yakni Rp1.320,7 triliun dengan penerimaan perpajakan lebih rendah dari tahun lalu. Untuk mengantisipasi pembengkakan defisit APBN 2024, pihaknya meminta pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2023.

"Pimpinan Banggar meminta pemerintah hati-hati sebab defisit APBN lebih besar dari target. UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29 persen PDB atau senilai Rp522,8 triliun, namun prognosis

defisit hingga akhir tahun potensi capai 2,7 persen setara Rp609,7

triliun," kata Said saat rapat kerja dengan pemerintah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Senin (8/7).

Ia menyatakan belanja pemerintah dalam APBN 2024 akan bengkak, menyebabkan defisit ikut terkerek naik. "Potensi pembengkakan belanja dari rencana Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun. Kami menyadari sepenuhnya karena berbagai gejala sebulan terakhir mau tidak mau kami menyiapkan diri Banggar jika pemerintah memerlukan tambahan dari SAL, sisa anggaran lebih," ujarnya.

Said mengatakan, Banggar siap mendukung pemerintah memanfaatkan SAL tersebut. "Proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tidak perlu dilanjutkan dan dipertimbangkan ulang," pungkasnya. **tn/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukung Inovasi *Stem Cell* RSI Sultan Agung Semarang

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional. Sudah berdiri sejak tahun 1971, kini mulai bertransformasi dalam meningkatkan layanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan zaman.

“Salah satu pengembangan layanan *stem cell* di tahun ini memberikan angin segar. Hal ini sekaligus membawa RSI Sultan Agung bertransformasi menjadi RS yang diperhitungkan untuk kalangan middle up,” pungkasnya usai memimpin kunjungan kerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang, Rabu (3/7).

Agung mengatakan bahwa inovasi *stem cell* sangat diperlukan. Utamanya dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang melakukan load pekerjaan sangat tinggi dan



FOTO: DIP/PTD

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin kunjungan kerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang, Rabu (3/7/2024).

tidak beraturan, termasuk Anggota DPR RI.

“Kami menemukan hal menarik, ditambah atas paparan Direktur Utama, Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si tadi, bahwa *stem cell* ini tidak sekedar mengobati, melainkan juga bisa mengembalikan fungsi tubuh. Artinya, *stem cell* juga bertugas dalam memastikan setiap sel rusak, akan diganti dengan sel yang baru,” tegas Agung.

Lebih Lanjut, Politisi Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya inovasi teknologi, dipastikan kompetisi rumah sakit dalam memberi layanan kesehatan yang unggul saat ini sangat ketat. **dip/aha**



SALAH SATU PENGEMBANGAN LAYANAN *STEM CELL* DI TAHUN INI MEMBERIKAN ANGIN SEGAR. HAL INI SEKALIGUS MEMBAWA RSI SULTAN AGUNG BERTRANSFORMASI MENJADI RS YANG DIPERHITUNGKAN UNTUK KALANGAN MIDDLE UP

Agung Budi Santoso
Ketua BURT DPR RI



Apresiasi Pengelolaan Anggaran Setjen DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI pada Semester I Tahun 2024. Menurutnya saat ini DPR RI sebagai lembaga sudah bekerja dengan baik khususnya dalam hal pengelolaan dan penyerapan anggaran.

“Intinya saya sampaikan bahwa kinerja Sekjen, Deputi, Kepala Badan, Inspektorat serta Kepala Biro, saya nilai kinerjanya sudah sangat baik sekali, sangat bagus sekali, saya mengapresiasi,” ujarnya saat pembukaan rapat Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (5/7).

Dalam paparannya yang dilakukan secara daring, Dim

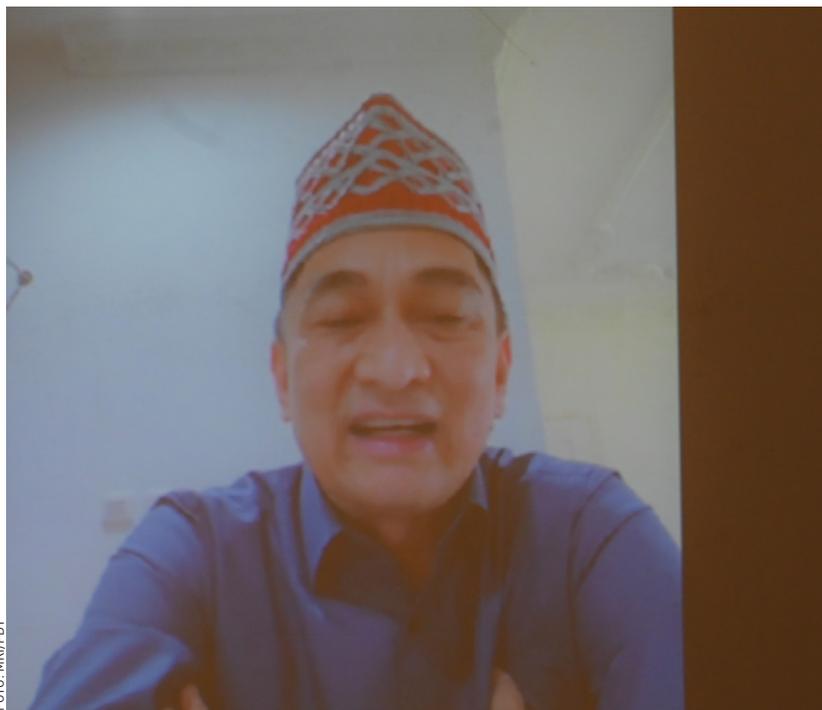


FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat membuka rapat Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI secara virtual di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (5/7/2024).



(sapaan akrabnya) mengingatkan agar capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga harus ditingkatkan, ia mendorong agar dimasa depan, guna mengoptimalkan kinerja DPR khususnya dalam hal pengelolaan dan penyerapan anggaran, maka harus ada penyesuaian pada tiap tiap pos dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.

Ia meminta agar sumber daya yang digunakan adalah yang benar-benar mumpuni dan berintegritas. “Sumber daya yang dipakai jangan yang bermain judi online, Harus diawasi. Maka oleh sebab itu, pengawasan (anggaran) ini harus bersifat ketat juga,” tegasnya. **srw/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



RADIO PARLEMEN

WARTA PARLEMEN | SUDUT DENGAR
PARLEMEN | PERNYATAAN WAKIL
RAKYAT | AGENDA DPR HARI INI | SUARA
RAKYAT | BUNG PARLE | PROFIL WAKIL
RAKYAT | WARNA WARNI PARLEMEN |
SELAMAT PAGI PARLEMEN | REPORT ON
THE SPOT | PUBLIC SERVICE
ANNOUNCEMENT | BERANDA AMI

tvrparlemen.dpr.go.id



Listen Now